

Kenaikan Pajak Dan Krisis Kepercayaan Publik: Analisis Faktor Pemicu Gelombang Demonstrasi Di Indonesia Tahun 2025

Wulan Ayu Musyirifah^{1*}, Denari Dhahana Edtiyarsih²

¹ Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

² Universitas Islam Negri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

wulanayumusyirifah@gmail.com, denaridhahana@uinkhas.ac.id

Abstrak

Demonstrasi besar-besaran pada tahun 2025 menjadi sorotan yang patut diteliti, terutama terkait aturan pajak dan dampaknya pada kemarahan warga. Artikel ini meneliti hubungan antara peningkatan tarif pajak dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berujung pada demonstrasi besar di Indonesia tahun 2025. Kenaikan pajak yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi rakyat memunculkan sentimen negatif dan rasa ketidakadilan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menelaah berita, unggahan media sosial, serta pernyataan pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab utama keresahan publik bukan hanya beban pajak yang meningkat, tetapi juga kurangnya keterbukaan informasi dan lemahnya strategi komunikasi kebijakan. Situasi ini memperdalam ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan memicu mobilisasi massa sebagai bentuk protes terhadap kebijakan fiskal yang dianggap tidak responsif.

Kata Kunci: Kenaikan pajak, Krisis kepercayaan public, demonstrasi 2025, kebijakan fiskal, sentiment public

PENDAHULUAN

Peraturan perpajakan di Indonesia akan mengalami banyak perubahan seiring berjalannya waktu dan perubahan jaman. Adanya pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok Negara, kebutuhan pembangunan dan lain-lain mengharuskan masyarakat untuk saling bergotong royong untuk bekerja sama membangun Negara dengan berbagai kebutuhannya melalui pajak.¹ Kenaikan pajak yang dinilai tidak berpihak pada kondisi ekonomi rakyat memunculkan sentimen negatif dan rasa ketidakadilan sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menelaah berita, unggahan media sosial, serta pernyataan pemerintah². Hasil kajian menunjukkan bahwa penyebab utama keresahan publik bukan hanya beban pajak yang meningkat, tetapi juga kurangnya keterbukaan informasi dan lemahnya strategi komunikasi kebijakan. Kebijakan kenaikan tarif pajak di Indonesia pada tahun 2025 menjadi isu publik yang memicu gelombang demonstrasi di berbagai daerah. Pemerintah beralasan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan pendapatan negara dan penguatan fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).³ Dalam undang-undang tersebut, pemerintah diberi kewenangan untuk melakukan penyesuaian tarif pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), guna memperluas basis pajak dan mendukung pembangunan nasional.

Masyarakat menilai kebijakan ini lebih menguntungkan kalangan atas dan memperburuk beban ekonomi rakyat kecil⁴. Kondisi tersebut berdampak pada turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan keadilan ekonomi. Krisis kepercayaan ini kemudian berkembang menjadi gelombang protes sosial yang masif, mencerminkan ketegangan antara kebijakan fiskal pemerintah dan ekspektasi masyarakat terhadap keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa pajak dan pungutan lain untuk keperluan negara harus ditetapkan dengan undang-undang dan dijalankan secara adil serta transparan⁵. Penelitian ini penting untuk memahami keterkaitan antara kebijakan fiskal dan dinamika sosial, khususnya mengenai bagaimana desain dan pelaksanaan regulasi pajak dapat memengaruhi tingkat penerimaan publik. Dengan mengambil aksi demo nasional 2025 sebagai studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang asal-usul ketidakpuasan masyarakat, serta menawarkan saran kebijakan yang lebih responsif. Temuan dari penelitian ini tidak hanya relevan bagi para pembuat kebijakan di sektor perpajakan, tetapi juga bermanfaat bagi akademisi dan masyarakat umum yang peduli pada usaha menciptakan sistem pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

¹ Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro, "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X, Jurnal Review, Vol.3, No.1, 2022, Hal.55

² Fajar Satriyawan Wahyudi, "Komunikasi Pejabat Publik Ditengah Krisis: Analisis Gaya Bicara Dan Dampaknya Pada Aksi Demo 29-31 Agustus 2025

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246.

⁴ Faisol et al, "Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset Sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* Keuangan Negara", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 6 No 2, 2025

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 23A.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam hubungan antara kenaikan tarif pajak dan krisis kepercayaan publik yang memicu demonstrasi di Indonesia tahun 2025. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara kontekstual berdasarkan persepsi, opini, dan respons masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, sebagaimana relevan dengan penelitian sosial-politik yang menyoroti dinamika perilaku massa dan legitimasi negara⁶. Metode ini juga sejalan dengan pandangan Wahyudi (2025) yang menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap gaya komunikasi pejabat publik dalam konteks krisis sosial⁷. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen, meliputi berita dari media massa, pernyataan resmi pemerintah, unggahan opini di media sosial, serta laporan lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil. Berita daring seperti Tempo.co (2025), Merdeka.com (2025), dan DetikEdu (Rosyadi, 2025) digunakan sebagai sumber data penting untuk menangkap persepsi publik serta dinamika opini masyarakat terhadap kebijakan fiskal maupun respons politik pemerintah. Selain itu, penelitian ini turut merujuk pada literatur perpajakan yang relevan, seperti Resmi (2011), terutama pada bagian yang membahas teori perpajakan dan implikasinya terhadap perilaku wajib pajak⁸.

Untuk menguatkan analisis mengenai kebijakan fiskal, penelitian ini juga memanfaatkan kajian akademik terkait perubahan tarif pajak dan pengaruhnya terhadap perilaku ekonomi, seperti studi mengenai dampak kenaikan PPN oleh Putri dan Subandoro (2022)⁹. Selain itu, peneliti menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur prinsip keadilan pajak, guna memastikan bahwa interpretasi kebijakan fiskal memiliki dasar hukum yang kuat.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola wacana, isu utama, argumentasi publik, serta bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan fiskal. Teknik ini memungkinkan peneliti mengolah informasi dari berbagai sumber tertulis dan digital sehingga dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara kebijakan kenaikan pajak, persepsi publik, dan munculnya krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika sosial-fiskal yang terjadi selama gelombang demonstrasi tahun 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gelombang demonstrasi yang melanda Indonesia pada tahun 2025 merupakan salah satu fenomena sosial-politik paling kompleks dalam satu dekade terakhir¹⁰. Aksi-aksi ini tidak hanya mencerminkan ekspresi kekecewaan spontan masyarakat, tetapi juga merupakan akumulasi panjang dari ketidakadilan fiskal, kegagalan komunikasi publik, perilaku elite politik yang tidak sensitif, serta melemahnya representasi politik di mata rakyat¹¹. Dalam perspektif *legitimacy theory* Weber, negara hanya dapat mempertahankan stabilitas ketika masyarakat mengakui otoritasnya sebagai sah¹². Namun, kebijakan fiskal yang kontroversial, seperti kenaikan tunjangan DPR di tengah krisis ekonomi, justru melemahkan legitimasi tersebut karena dianggap tidak memiliki sense of crisis dan tidak selaras dengan kondisi ekonomi rakyat¹³. Penolakan luas terhadap kebijakan ini menunjukkan terjadinya *legitimacy erosion*, yaitu proses ketika otoritas negara kehilangan dukungan moral dan rasional dari masyarakat akibat tindakan yang dinilai tidak adil¹⁴. Situasi ini mengindikasikan retaknya hubungan negara-warga, sehingga setiap kebijakan fiskal yang tidak selaras dengan rasa keadilan publik akan mudah menjadi pematik konflik sosial yang lebih luas dan memicu mobilisasi massa dalam skala nasional¹⁵.

Pemicu awal demonstrasi adalah kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan, yang diumumkan pada saat masyarakat sedang menghadapi tekanan ekonomi dan lonjakan harga kebutuhan pokok. Publik menilai kebijakan ini sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap penderitaan rakyat¹⁶. Dalam *social justice theory* Rawls, kebijakan publik dianggap adil bila menguntungkan kelompok yang paling rentan; namun kenaikan tunjangan DPR menunjukkan arah kebijakan yang berlawanan, memperkokoh ketimpangan¹⁷. Ketidakadilan ini juga berkaitan dengan teori *relative deprivation* (Gurr), yaitu kondisi ketika masyarakat merasa dirugikan karena membandingkan kondisinya dengan kelompok elite yang

⁶ Faisol et al, "Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset Sebagai Pilar Pencegahan *Fraud* Keuangan Negara", Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 6 No 2, 2025

⁷ Fajar Satriyawan Wahyudi, "Komunikasi Pejabat Publik Ditengah Krisis: Analisis Gaya Bicara Dan Dampaknya Pada Aksi Demo 29-31 Agustus 2025

⁸ Resmi, Siti, (2011). Perpajakan Teori Dan Kasus, Jakarta: SALEMBA EMPAT.

⁹ Veni Gerhana Putri, Agus Subandoro, "Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Penjualan Pada PT X, Jurnal Review, Vol.3, No.1, 2022

¹⁰ Voice Indonesia. (2025, Agustus 26). Aksi protes: Rakyat tolak kenaikan tunjangan DPR di tengah gelombang PHK.

¹¹ DetikEdu. (2025, Agustus 29). Kenaikan tunjangan DPR didemo mahasiswa-buruh, dosen UGM: Kebijakan nir-empati.

¹² Nikolakakis, N. (2024). Legitimacy, power, and authority: A Weberian perspective. *Sociedade e Estado*, 39, Article e49343

¹³ Beritasembilan (2025, Februari 30). Kenaikan Tunjangan DPR Pemicu Gelombang Aksi Massa Berdarah.

¹⁴ Seidemann, I., Weißmüller, K. S., & Geiger, D. (2025). The downward spiral of legitimacy erosion: Lessons on network governance failure during the German "refugee crisis". *Public Administration Review*.

¹⁵ DetikNews. (2025, September 1). Massa mahasiswa demo di DPRD NTT, Tuntut tolak kenaikan tunjangan DPR.

¹⁶ Tempo.co (2025, Februari 5), "Kenaikan Tunjangan DPR Picu Gelombang Demo Di Berbagai Daerah," Tempo

¹⁷ Dutta, S. (2017). Rawls' theory of justice: An analysis. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(4), 40–43

secara drastis lebih diuntungkan¹⁸. Ketika kontribusi pajak publik tidak diterjemahkan menjadi layanan yang berkualitas, tetapi justru menjadi fasilitas pejabat, hal itu menimbulkan rasa frustrasi kolektif yang memicu aksi massa.

Ketegangan mencapai puncaknya setelah tragedi yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, ketika kendaraan taktis polisi menerobos massa demonstran¹⁹. Video insiden tersebut menyebar luas di media sosial dan memicu empati serta kemarahan publik. Dalam perspektif komunikasi krisis, insiden semacam ini dapat menggeser opini publik secara drastis, terutama ketika emosi masyarakat sudah berada pada titik jenuh. Presiden Prabowo memang menunjukkan empati dengan melayat langsung ke rumah duka, suatu langkah simbolik yang secara *political trust theory* dapat meredakan tensi sementara²⁰. Namun, tindakan simbolis tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah tergerus.

Situasi diperburuk oleh respons sejumlah anggota DPR yang justru memperkuat citra ketidakpekaan elite politik. Pernyataan Nafa Urbach yang mempertahankan kenaikan tunjangan karena alasan transportasi, sindiran Ahmad Sahroni yang menyebut pengkritik sebagai “orang paling bodoh di dunia,” hingga unggahan parodi oleh Eko Patrio memicu kemarahan baru²¹. Tindakan-tindakan ini memperkuat elite disconnect theory, yakni ketika elite politik kehilangan sensitivitas terhadap realitas sosial masyarakat. Ketika elite gagal menunjukkan empati sosial, publik merasa tidak lagi diwakili secara moral maupun politik suatu kondisi yang menurut *political representation theory* dapat memicu delegitimasi institusi legislatif²².

Kegagalan komunikasi publik juga menjadi aspek penting dari meletusnya demonstrasi. Kebijakan fiskal idealnya harus disertai dengan komunikasi transparan, terukur, dan humanis. Namun minimnya informasi mengenai alasan kenaikan anggaran, tujuan fiskal jangka panjang, dan mekanisme kontrol anggaran menyebabkan publik mengisi kekosongan informasi dengan kecurigaan. Kecurigaan ini berkembang menjadi ketidakpercayaan luas terhadap pemerintah. Berdasarkan *fiscal contract theory*, legitimasi fiskal hanya bertahan jika masyarakat melihat hubungan yang adil antara pajak yang dibayar dan manfaat publik yang diterima²³. Ketika fasilitas publik stagnan atau menurun, sementara pejabat menikmati kenaikan tunjangan, kontrak fiskal dianggap dilanggar²⁴.

Selain faktor struktural, peran media digital tidak dapat diabaikan. Penyebaran informasi melalui TikTok, Instagram, X, dan WhatsApp menciptakan gelombang opini publik yang bergerak cepat. Dalam kerangka *connective action theory* (Bennett & Segerberg), gerakan sosial modern tidak membutuhkan struktur organisasi formal; cukup dengan narasi viral yang menyentuh rasa ketidakadilan, publik bisa tergerak secara kolektif dalam waktu singkat²⁵. Narasi tentang ketidakadilan fiskal, ketidakpekaan pejabat, dan tragedi Affan memicu simpati, kemarahan, dan solidaritas digital yang kemudian berkonversi menjadi aksi massa.

Salah satu faktor yang memperdalam krisis kepercayaan adalah *participation gap*, yaitu ketimpangan antara pembuat kebijakan dan publik dalam proses perumusan kebijakan fiskal²⁶. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses yang menyangkut kehidupan mereka, sehingga respons mereka dalam bentuk demonstrasi menjadi bentuk *corrective feedback* terhadap pemerintah. MetroJambi (2025) bahkan melaporkan bahwa klarifikasi yang diberikan DPR dianggap tidak relevan, semakin menegaskan bahwa komunikasi pemerintah tidak menyentuh substansi masalah²⁷. Gelombang demonstrasi juga meluas ke berbagai daerah NTT, Kalimantan, Jawa, Sulawesi menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya masalah sentralistik, tetapi problem nasional. DetikNews (2025) mencatat bahwa mahasiswa di NTT turut menuntut penghentian tunjangan DPR²⁸.

¹⁸ Smith, H. J., & Pettigrew, T. F. (2020). Relative deprivation theory: Advances and applications. In *Social comparison, judgment, and behavior* (pp. 495–526). Oxford University Press

¹⁹ Merdeka.com. (2025, August 31). Tragedi Affan: Empati Prabowo dan janji negara hadir usai pengemudi ojol tewas dilindas kendaraan taktis.

²⁰ Lahusen, C. (2024). Trust and distrust in political institutions: Conceptual and theoretical reassessments. *Journal of Political Sociology*, 2, 80.

²¹ DetikEdu. (2025, September 1). Dosen FISIP soal penyebab demo: Rakyat bayar pajak, tapi dinikmati pejabat. Antara.

²² Hamilton, L., Brito Vieira, M., Disch, L., & Thomassen, L. (2023). The power of political representation. *Contemporary Political Theory*, 23(3), 1–29.

²³ Brockmeyer, A., Garfias, F., & Suárez Serrato, J. C. (2025, June 30). The fiscal contract up close: Experimental evidence from Mexico City [Working paper]. World Bank; Institute for Fiscal Studies (IFS); University College London (UCL); Centre for Economic Policy Research (CEPR); Duke University; Stanford Graduate School of Business; National Bureau of Economic Research (NBER).

²⁴ DetikEdu. (2025, September 1). Dosen FISIP soal penyebab demo: Rakyat bayar pajak, tapi dinikmati pejabat.

²⁵ Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Cambridge University Press.

²⁶ Bartle, J., Birch, S., & Skirumunt, M. (2017). The local roots of the participation gap: Inequality and voter turnout. *Electoral Studies*, 48, 30–44.

²⁷ MetroJambi. (2025, Agustus 26). Usai didemo massa, Wakil Ketua DPR klarifikasi soal tunjangan rumah Rp 50 juta sebulan.

²⁸ DetikNews. (2025, September 1). Massa mahasiswa demo di DPRD NTT, Tuntut tolak kenaikan tunjangan DPR

Fenomena ini selaras dengan konsep fairness backlash (Gasparini & Reyes, 2022), yaitu reaksi masyarakat terhadap kebijakan yang dianggap melanggar prinsip keadilan sosial²⁹.

Transparansi fiskal juga menjadi bagian dari krisis ini. Menurut Khosrowjerdi (2022), tingkat transparansi nasional sangat memengaruhi kepercayaan publik³⁰. Ketika masyarakat tidak diberi akses pada penjelasan yang jujur dan detail tentang penggunaan anggaran, spekulasi negatif akan berkembang dengan cepat. Kurangnya keterbukaan DPR memperkuat persepsi adanya ketidakadilan fiskal dan potensi penyalahgunaan anggaran.

Reaksi pemerintah pusat yang bersifat simbolis tidak cukup untuk menyelesaikan krisis struktural ini. RadarTV (2025) melaporkan bahwa masyarakat menuntut perubahan sistemik, bukan hanya klarifikasi³¹. Beberapa rekomendasi reformasi yang muncul antara lain penerapan *participatory budgeting*³² untuk memberi ruang partisipasi publik dalam penyusunan anggaran, serta pembenahan struktur pengawasan internal sebagaimana ditegaskan Situngkir (2004), yang menyoroti pentingnya kontrol untuk mencegah korupsi dan pengambilan keputusan yang menyimpang³³.

Secara keseluruhan, demonstrasi 2025 bukan hanya reaksi terhadap kenaikan tunjangan DPR, tetapi sebuah cerminan krisis kepercayaan publik terhadap sistem politik dan fiskal negara. Berdasarkan integrasi teori legitimasi, kontrak sosial, keadilan sosial, konflik, dan komunikasi publik, terlihat bahwa akar permasalahan terletak pada ketidakadilan struktural, minimnya transparansi, perilaku elite yang tidak empatik, serta ketidakhadiran negara dalam memberikan manfaat fiskal yang nyata kepada masyarakat. Demonstrasi ini menjadi penanda bahwa legitimasi negara tidak hanya dibangun melalui kekuasaan formal, tetapi melalui rasa keadilan, transparansi, dan empati yang dirasakan oleh rakyat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil analisis tersebut adalah gelombang yang terjadi di Indonesia pada tahun 2025 yaitu kekecewaan public terhadap berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Kenaikan pajak yang dilakukan ditengah kondisi ekonomi yang sulit menjadi pemicu utama meningkatnya kemarahan masyarakat. Situasi ini semakin diperburuk dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan tunjangan anggota DPR hingga Rp50 juta perbulan, sehingga menimbulkan persepsi ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang tajam antara elit politik dan rakyat biasa. Selain itu, faktor non-ekonomi seperti insiden tragis yang menimpa pengemudi ojek online akibat tindakan represif aparat, serta pernyataan Ahmad Sahroni yang menyinggung harga diri masyarakat dengan menyebut mereka sebagai “orang paling bodoh sedunia”. Turut memperbesar kemarahan public. Peristiwa peristiwa ini memperlihatkan bahwa krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga Negara telah mencapai titik krisis.

Pemerintah perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting bahwa kebijakan fiskal seperti pajak tidak hanya berdampak pada angka ekonomi, tetapi juga pada legitimasi dan stabilitas sosial. Transparansi, keadilan distribusi, serta sifat empati dari para pemimpin menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan public dan mencegah krisis serupa di masa mendatang.

²⁹ Gasparini, L., & Reyes, G. (2022). Are fairness perceptions shaped by income inequality? Evidence from Latin America. *Journal of Economic Inequality*. Advance online publication

³⁰ Khosrowjerdi, M. (2022). Good governance and national information transparency: A comparative study of 117 countries. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 13192, pp. 143–160). Springer.

³¹ RadarTV Disway. (2025, August 26). Demo 25 Agustus ricuh, DPR janji tampung aspirasi di tengah sorotan tunjangan Rp50 juta.

³² Aziz, H., & Shah, N. (2020). Participatory budgeting: Models and approaches (arXiv:2003.00606). arXiv.

³³ Situngkir, H. (2004). The structural dynamics of corruption: Artificial society approach (arXiv:nlin/0403042). arXiv.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, S. N. (2025, August 26). Aksi protes: Rakyat tolak kenaikan tunjangan DPR di tengah gelombang PHK. Voice Indonesia. Link: <https://voiceindonesia.co/nasional/26/08/2025/60406/aksi-protes-rakyat-tolak-kenaikan-tunjangan-dpr-di-tengah-gelombang-phk/>
- Aziz, H., & Shah, N. (2020). Participatory budgeting: Models and approaches (arXiv:2003.00606). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.00606>
- Bartle, J., Birch, S., & Skirmuntt, M. (2017). The local roots of the participation gap: Inequality and voter turnout. *Electoral Studies*, 48, 30–44. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.05.004>
- Bennett, W. L., & Segerberg, A. (2012). The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139198752>
- Beritasembilan.com. (2025, August 30). Kenaikan tunjangan DPR memicu gelombang aksi massa berdarah. Link: <https://beritasembilan.com/kenaikan-tunjangan-dpr-pemicu-gelombang-aksi-massa-berdarah>
- Brockmeyer, A., Garfias, F., & Suárez Serrato, J. C. (2025, June 30). The fiscal contract up close: Experimental evidence from Mexico City [Working paper]. World Bank; Institute for Fiscal Studies (IFS); University College London (UCL); Centre for Economic Policy Research (CEPR); Duke University; Stanford Graduate School of Business; National Bureau of Economic Research (NBER).
- DetikEdu. (2025, September 1). Dosen FISIP soal penyebab demo: Rakyat bayar pajak, tapi dinikmati pejabat. Antara. Link: <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-8090198/dosen-fisip-soal-penyebab-demo-rakyat-bayar-pajak-tapi-dinikmati-pejabat>
- DetikNews. (2025, August 26). Massa mahasiswa demo di DPRD NTT,untut tolak kenaikan tunjangan DPR. Link: <https://news.detik.com/berita/d-8090388/massa-mahasiswa-demo-di-dprd-ntt-tuntut-tolak-kenaikan-tunjangan-dpr>
- Dutta, S. (2017). Rawls' theory of justice: An analysis. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 22(4), 40–43. <https://doi.org/10.9790/0837-2204014043>
- Faisol, M., et al. (2025). Aksi Demo 2025: RUU Perampasan Aset sebagai pilar pencegahan fraud keuangan negara. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 6(2).
- Gasparini, L., & Reyes, G. (2022). Are fairness perceptions shaped by income inequality? Evidence from Latin America. *Journal of Economic Inequality*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10888-022-09526-w>
- Hamilton, L., Brito Vieira, M., Disch, L., & Thomassen, L. (2023). The power of political representation. *Contemporary Political Theory*, 23(3), 1–29. <https://doi.org/10.1057/s41296-023-00665-x>
- Hasendra, Y. (2025, August 26). Usai didemo massa, wakil ketua DPR klarifikasi soal tunjangan rumah Rp50 juta sebulan. MetroJambi. Link: <https://www.metrojambi.com/nasional/136485821/usai-didemo-massa-wakil-ketua-dpr-klarifikasi-soal-tunjangan-rumah-rp50-juta-sebulan>
- Khosrowjerdi, M. (2022). Good governance and national information transparency: A comparative study of 117 countries. In *Lecture Notes in Computer Science* (Vol. 13192, pp. 143–160). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96957-8_14
- Lahusen, C. (2024). Trust and distrust in political institutions: Conceptual and theoretical reassessments. *Journal of Political Sociology*, 2, 80. <https://doi.org/10.54195/jps.19659>
- Merdeka.com. (2025, August 31). Tragedi Affan: Empati Prabowo dan janji negara hadir usai pengemudi ojol tewas dilindas kendaraan taktis. <https://share.google/7hh5dMFAuyPSgaEou>
- Nikolakakis, N. (2024). Legitimacy, power, and authority: A Weberian perspective. *Sociedade e Estado*, 39, Article e49343. <https://doi.org/10.1590/s0102-6992-20243901e49343>
- RadarTV Disway. (2025, August 26). Demo 25 Agustus ricuh, DPR janji tampung aspirasi di tengah sorotan tunjangan Rp50 juta. Link: <https://radartv.disway.id/politik/read/27575/demo-25-agustus-ricuh-dpr-tampung-aspirasi>
- Resmi, S. (2011). Perpajakan: Teori dan kasus. Salemba Empat.
- Rosyadi, S. (2025). Dosen FISIP soal penyebab demo: Rakyat bayar pajak, tapi dinikmati pejabat. DetikEdu. Link: <https://share.google/Nq57cWEROdpAcJUYX>
- Satriyawan Wahyudi, F. (2025). Komunikasi pejabat publik di tengah krisis: Analisis gaya bicara dan dampaknya pada aksi demo 29–31 Agustus 2025.